

ANALISIS PAGU INDIKATIF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



JUNI 2025

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

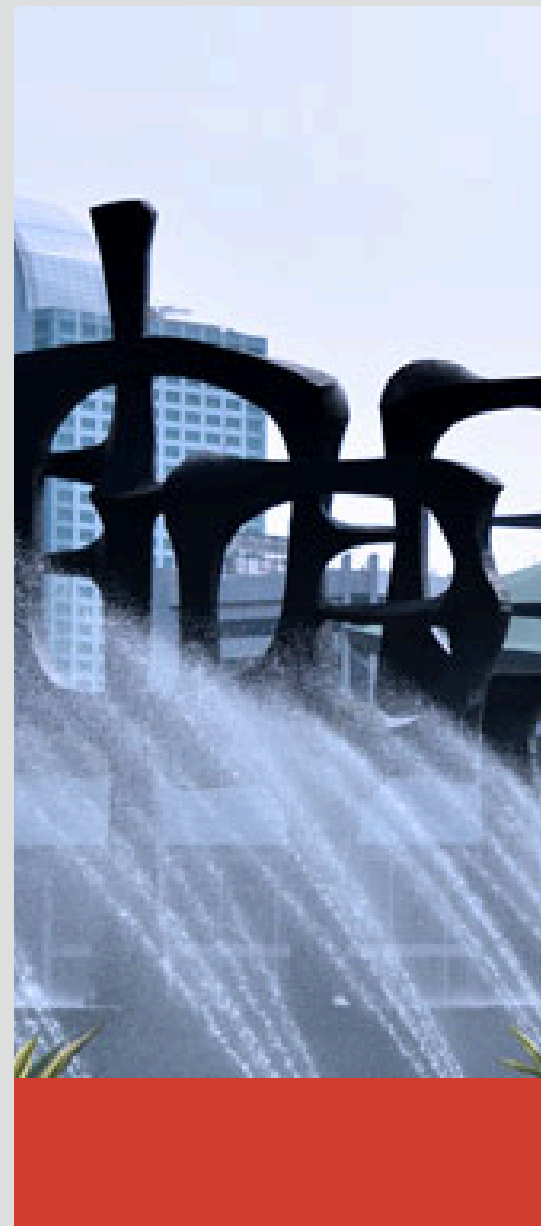
Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

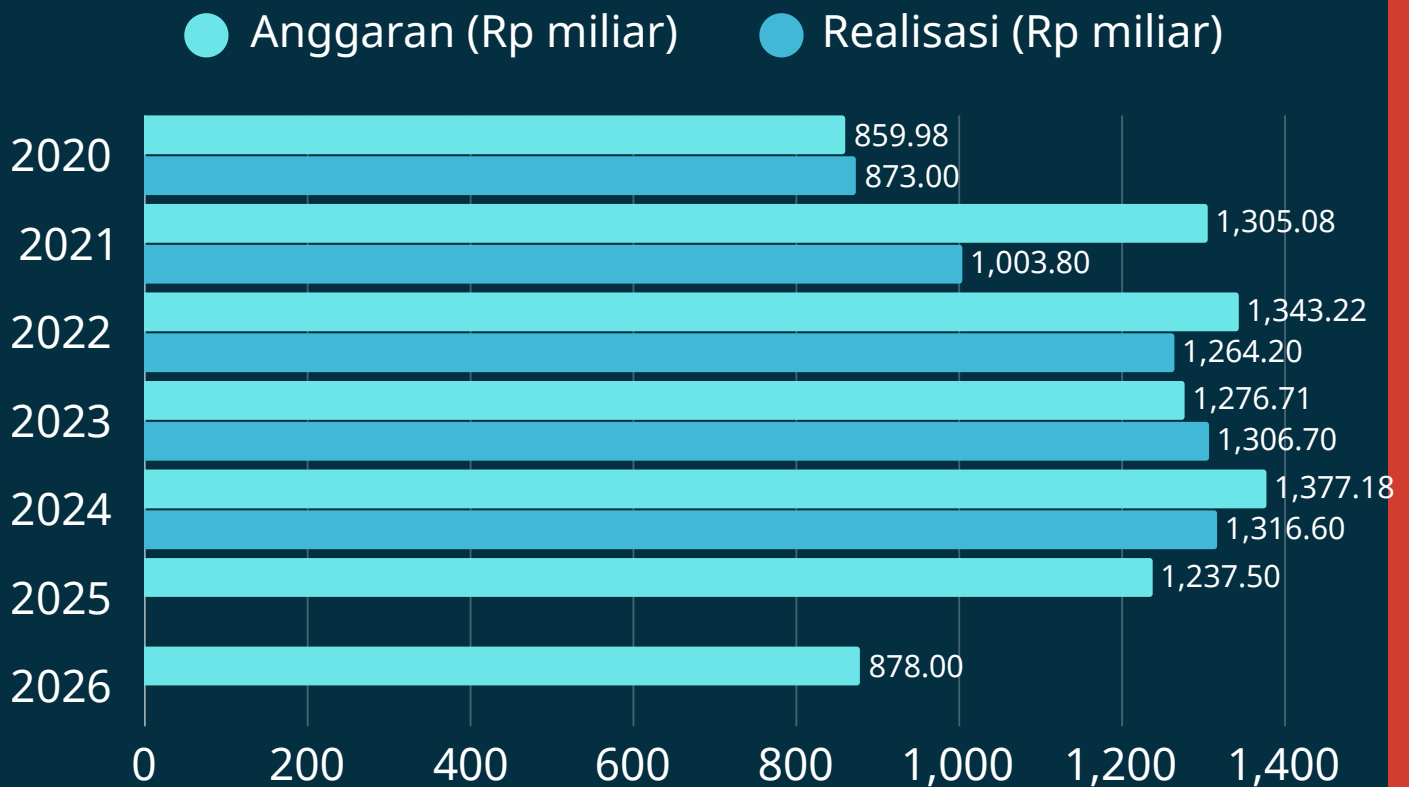
Penulis:

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si., Fachry Ali Firdaus, S.E., Tio Riyono S.E.,

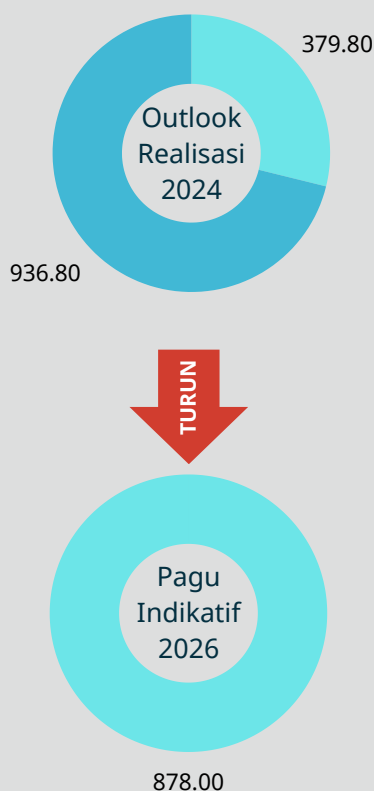
Daftar Isi

Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2025	03
Output & Outcome Anggaran 2025	04
KPK dalam RPJMN 2025-2029	06
Target IPK Tanpa Dukungan Anggaran yang Memadai	08
Optimalkan pemberantasan Korupsi oleh KPK tanpa alokasi anggaran?	09





KEMPPKF 2026, Nota Keuangan, LKPP



Pagu Indikatif 2026

Pagu Indikatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2026 sebesar Rp878 miliar. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan nilai pagu indikatif KPK 2025 yang mencapai Rp1.237 miliar. Penurunan ini besaran pagu indikatif KPK terjadi karena anggaran KPK hanya digunakan untuk membiayai program dukungan manajemen. Pada tahun 2026, KPK tidak mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi.

Apabila dibandingkan dengan besaran anggaran program dukungan manajemen di tahun 2025, alokasi anggaran KPK 2026 mengalami penurunan sebesar 8,32%.



Realisasi anggaran program pencegahan dan penindakan perkara korupsi tidak pernah mencapai 100%

Pada periode 2020 hingga 2024, realisasi anggaran program pencegahan dan penindakan perkara korupsi menunjukkan adanya tren peningkatan, namun tidak pernah mencapai 100%. Realisasi anggaran program pencegahan dan penindakan perkara korupsi mencapai titik terendah pada tahun 2021.

Program pencegahan dan penindakan perkara korupsi ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi, sosialisasi anti korupsi maupun penanganan perkara korupsi.

Secara rata-rata 75,4% anggaran program pencegahan dan penindakan perkara korupsi digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi. Kurang dari 25% anggaran program pencegahan dan penindakan perkara korupsi yang digunakan untuk penanganan tindak pidana korupsi.



Realisasi anggaran program dukungan manajemen menunjukkan adanya tren peningkatan pada periode 2020 - 2024

Kinerja realisasi anggaran program dukungan manajemen menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan realisasi anggaran program pencegahan dan penindakan perkara korupsi. Secara rata-rata realisasi anggaran program dukungan manajemen berada di atas 100%. Bahkan pada tahun 2020 realisasi anggaran program dukungan manajemen mencapai 112,61%.

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 4



Target Sasaran/Outcome

- Penguatan integritas masyarakat
- Tercegahnya korupsi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan
- Optimalnya pelaksanaan Rencana Aksi Stranas PK
- Tegaknya kepastian hukum dalam penindakan pidana korupsi
- Meningkatnya keterpaduan pemberantasan korupsi
- Membangun sistem informasi dan data terintegrasi
- Penguatan budaya organisasi
- Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya KPK
- Terwujudnya KPK yang transformatif dan akuntabel
- Meningkatnya Kinerja SDM dan Budaya Organisasi KPK
- Meningkatnya reputasi lembaga dan dukungan publik
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya KPK

Output & Outcome Anggaran 2025

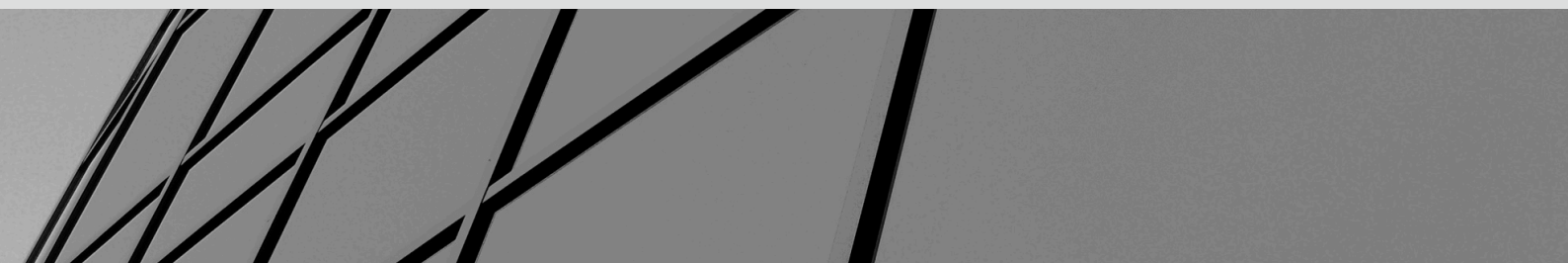
HALAMAN 5

→ Target Keluaran/Output 2025

- Sertifikasi Profesi dan SDM 1.600 orang
- 12 kesepakatan/ dokumen kerjasama
- 580 penanganan perkara
- Fasilitasi dan pembinaan kepada 17.471 lembaga
- Pengawasan dan pengendalian masyarakat (400.300 orang/ laporan)
- Pengawasan dan pengendalian lembaga terhadap 50 lembaga
- Pengawasan dan pengendalian terhadap 152 layanan
- 48 Laporan pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
- 1.488 Laporan/kajian pemantauan lembaga
- 20 Unit sarana di bidang teknologi informasi dan komunikasi
- 1 Laporan/rekomendasi pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
- 1 Rekomendasi kebijakan di bidang hukum dan HAM
- Sertifikasi profesi dan SDM terhadap 500 orang
- 1 Laporan pemantauan lembaga
- 1 Sistem informasi pemerintah
- Peningkatan kapasitas aparatur negara terhadap 1.000 orang, KL, daerah, unit kerja
- 14 Layanan dukungan manajemen internal
- 1.340 Unit/m2/ paket layanan saran dan prasarana internal
- Layanan manajemen SDM Internal kepada 2.001 orang
- 24 Dokumen layanan manajemen kinerja internal
- 1 Rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM

KPK Dalam RPJMN 2025–2029

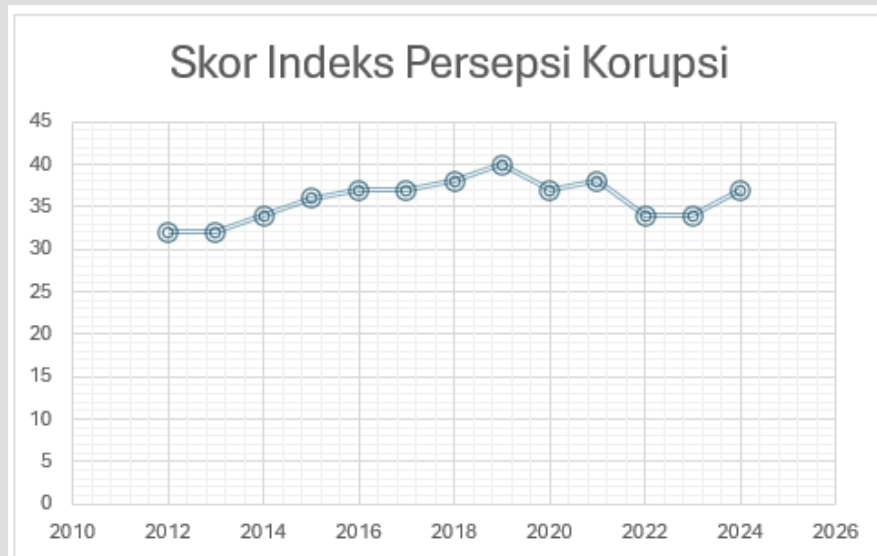
PRIORITAS NASIONAL	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional sistem komunikasi, kebebasan pers dan media massa yang berintegritas
INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL	Indeks Persepsi Korupsi
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Terwujudnya sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks integritas nasional 2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)



Kemkomdigi Dalam RPJMN 2025-2029

KEGIATAN PRIORITAS	Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi Secara Lebih Sistematis	Pemberantasan Korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya antikorupsi	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	Terwujudnya pelembagaan gerakan pemberantasan korupsi lebih sistematis	Terciptanya peningkatan kesadaran antikorupsi	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi di sektor pemerintahan dan masyarakat
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	Nilai dimensi internal (indeks integritas nasional)	Nilai dimensi persepsi (Indeks persepsi anti korupsi).	Nilai dimensi eksternal (Indeks Integritas Nasional)
PROYEK PRIORITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi 2. Gerakan pemberantasan korupsi lebih sistematis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antikorupsi 2. Gerakan budaya antikorupsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi pencegahan tindak pidana korupsi 2. Sistem pencegahan korupsi di sektor peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik

Target IPK Tanpa Dukungan Anggaran yang Memadai

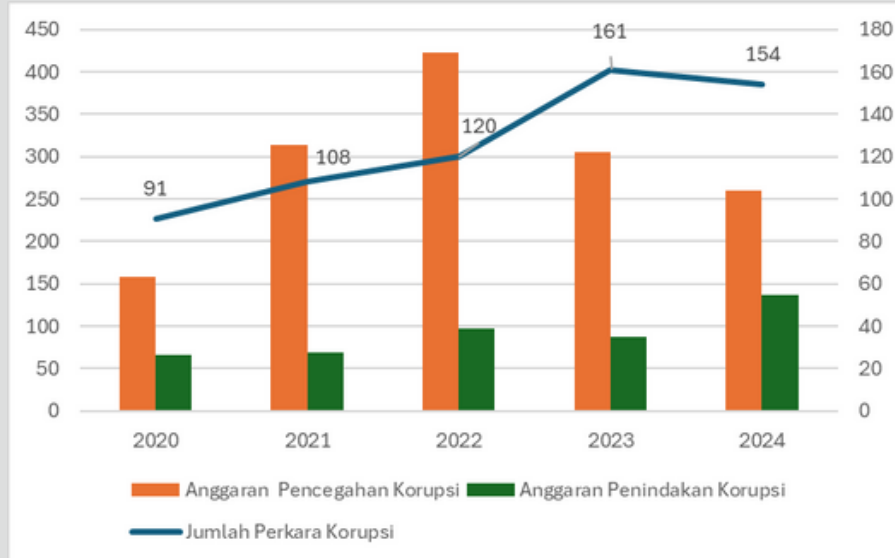


Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan skor naik menjadi 37/100 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 34/100. Peningkatan ini juga mengangkat peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 180 negara, lebih baik dibanding tahun sebelumnya di peringkat 115. Perbaikan skor ini mencerminkan meningkatnya persepsi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Guna mencapai target RPJMN, yaitu IPK Indonesia mencapai 43,7 di tahun 2029 maka setiap tahunnya IPK Indonesia perlu mengalami peningkatan sebesar 1,43 tiap tahunnya. Hal ini tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sistem pemerintahan yang antikorupsi dan pemberantasan korupsi yang efektif merupakan upaya yang harus dilakukan pemerintah. **Upaya pemberantasan korupsi ini tentunya memerlukan dukungan anggaran. Tanpa adanya anggaran, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.**

Optimalkan pemberantasan Korupsi oleh KPK tanpa alokasi anggaran?

Perkembangan Anggaran KPK per Program dan Jumlah Perkara Korupsi



Jumlah kasus yang ditangani oleh KPK menunjukkan fluktuasi. Pada periode 2020 hingga 2023, terjadi tren peningkatan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh KPK memiliki pola yang sama dengan alokasi anggaran penindakan korupsi. **Apabila tidak ada alokasi anggaran penindakan korupsi, apakah KPK masih dapat melakukan penindakan terhadap kasus korupsi?**



Follow Kami



www.bkd.dpr.go.id



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)